SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2022
PERDA NO. 9, LD 2022/NO. 154, TLD 2022/NO 140, 62 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK:

- Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus bangsa, maka negara harus menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Tindakan kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya terhadap anak masih menjadi permasalahan dalam masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga membutuhkan upaya yang terencana, sistematis dan terpadu terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapak kali diubah terakhir dengan UU N0. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 78 Tahun 2021; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2022.

- Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup yang meliputi Pemenuhan Hak Anak; Perlindungan Khusus Anak; Perkawinan Usia Anak; Kebijakan KLA; Ruang Partisipasi Anak; Sistem Data Gender dan Anak; peran serta Masyarakat; mekanisme koordinasi; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dan Pasal 18 dan Ketentuan yang mengatur mengenai Anak dalam Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 Desember 2022 dan ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2022, dengan Nomor Register (9/255/2022).